

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN 2015



Kerjasama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan
dengan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN 2015



Kerjasama
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekalongan
dengan Badan Pusat Statistik Kota Pekalongan

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PEKALONGAN TAHUN 2015

No. Katalog	: 4102002.3375
ISSN	: -
No. Publikasi	: 33750.1616
Ukuran Buku	: 18,2 x 25,7 cm
Jumlah Halaman	: viii + 43
Naskah	: Seksi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Kota Pekalongan
Gambar Kulit	: Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik BPS Kota Pekalongan
Diterbitkan oleh	: BPS Kota Pekalongan

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Prohibited to announce, distribute, communicate, and/or copy part or all of this book for commercial purpose without permission from BPS-Statistics Indonesia



SAMBUTAN WALIKOTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kuasa dan ridho-Nya, Pemerintah Kota Pekalongan melalui kerjasama antara BAPPEDA dengan Kantor BPS Kota Pekalongan dapat menyelesaikan dan mempublikasikan buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Pekalongan Tahun 2015. Publikasi buku IPM ini memiliki peranan penting, khususnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya dilihat dari aspek pendidikan, kesehatan, dan kemampuan daya beli.

Kami juga mengucapkan terima kasih, baik kepada BAPPEDA maupun Kantor BPS Kota Pekalongan, karena telah dapat target publikasinya pada tahun 2015 ini secara lebih cepat. Oleh karena itu, saya berharap agar buku ini selain dapat dimanfaatkan untuk mengukur ketercapaian hasil pembangunan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga sebagai pendorong bagi munculnya program-program dan kegiatan baru yang sangat berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Disamping itu, kepada semua pihak yang bersentuhan dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak langsung, diharapkan juga dapat menggunakan buku ini dengan baik. Sehingga fokus pelaksanaan program ataupun kegiatannya dapat mudah dikoordinasikan dengan berbagai pihak lainnya.

Demikian sambutan pengantar dari kami. Mudah-mudahan Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua untuk terus dapat mengabdikan diri kita bagi sebaik-baiknya kesejahteraan masyarakat.

Sekian,

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Pekalongan, Oktober 2016

WALIKOTA PEKALONGAN

ACHMAD ALF ARSLAN DJUNAID, SE

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga buku Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2014 telah dapat diterbitkan.

Sejak Tahun 2015, Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan dihitung dengan metode yang berbeda. Hal ini dikarenakan adanya penggunaan metode baru sesuai dengan arahan UNDP, yang menggunakan variabel -Angka Harapan Hidup saat lahir, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dengan responden diatas 25 tahun), Nilai 99 Komoditas PPP- yang dihitung dengan rata-rata ukur atau geometrik..

Berkaitan dengan nilai IPM dengan metode baru, nilai IPM Kota Pekalongan Tahun 2015 naik dari 71,53 (2014) menjadi 72,69 (2015). Angka IPM Kota Pekalongan ini diatas rata-rata provinsi Jawa Tengah yang berada pada nilai 69, 49 (2015). Capaian nilai IPM Kota Pekalongan menduduki peringkat ke 10 di Provinsi Jawa Tengah.

Akhir kata, kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan buku Indeks Pembangunan Manusia ini. Semoga publikasi ini dapat memberikan manfaat bagi pembangunan Kota Pekalongan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, Oktober 2016

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENGANGUNAN DAERAH
KOTA PEKALONGAN
Sekretaris



Dr. ANITA HERU KUSUMORINI, M.Sc
NIP. 19650717 199203 2 014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya hingga publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Pekalongan Tahun 2015 dapat terwujud.

Publikasi ini berisi gambaran tentang tingkat kemajuan pembangunan manusia yang telah dicapai oleh Kota Pekalongan hingga tahun 2015 beserta komponen-komponennya yang terdiri dari bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, serta hal lainnya yang terkait.

Dengan diterbitkannya publikasi ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi bahan masukan serta pertimbangan dalam mengevaluasi dan mengambil kebijakan pembangunan khususnya pembangunan manusia di Kota Pekalongan pada masa yang akan datang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dan terlibat dalam penyusunan publikasi ini diucapkan terima kasih dan kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Pekalongan, Oktober 2016



DAFTAR ISI

	Halaman
SAMBUTAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	
Latar Belakang	1
BAB II METODOLOGI	
II.1 Konsep dan Definisi	3
II.2 Indikator dan Variabel	4
II.3 Sumber Data	5
II.4 Metode Penghitungan IPM	5
BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH	
III.1 Kondisi Geografis	16
III.2 Kependudukan	16
BAB IV ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA	
IV.1 Indikator Pendidikan	18
IV.2 Indikator Kesehatan	26
IV.3 Indikator Standar Hidup Layak	30
BAB V PENUTUP	
Kesimpulan	36
LAMPIRAN	37

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum Komponen IPM	9
Tabel 2.2. Besaran Nilai IPM dan Statusnya	10
Tabel 2.3. Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir	13
Tabel 4.1. Harapan Lama Sekolah se eks Karesidenan Pekalongan	20
Tabel 4.2. Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Berstatus Masih Sekolah di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015	22
Tabel 4.3. Banyaknya Fasilitas Pendidikan dan Rasio Antara Murid Terhadap Guru dan Sekolah Di Kota Pekalongan Tahun 2014-2015	24
Tabel 4.4. Angka Harapan Hidup di eks Karesidenan Pekalongan 2011-2015	26
Tabel 4.5. Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan di Kota Pekalongan 2014-2015	28
Tabel 4.6. Jumlah Tenaga Kerja Penduduk Usia 15 Tahun ke atas Tahun 2011-2015	29
Tabel 4.7. Angka Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp) di eks Karesidenan Pekalongan	31
Tabel 4.8. Angka IPM Kota Pekalongan Tahun 2011-2015	32
Tabel 4.9. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan se eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015	34

DAFTAR GRAFIK

		Halaman
Grafik 1	HLS dan RLS se eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015	21
Grafik 2	Persentase Penduduk Usia 7-24 Tahun Yang Masih Bersekolah di Kota Pekalongan	23
Grafik 3	Angka Harapan Hidup dan Kematian Bayi Kota Pekalongan Tahun 2011-2015	27
Grafik 4	Pertumbuhan IPM se eks Karesidenan Pekalongan 2011-2015	33
Grafik 5	Pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan se eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015	34
Grafik 6	Pertumbuhan IPM Kabupaten Kota se Jawa Tengah Tahun 2015	35

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Penduduk Di Kota Pekalongan Tahun 2015 Menurut Kelompok Umur	38
Tabel 2 Persentase Partisipasi Sekolah Di Kota Pekalongan Tahun 2015 Menurut Kelompok Usia Sekolah	39
Tabel 3 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2015	40
Tabel 4 Jumlah Kelas Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2015	41
Tabel 5 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2015	42
Tabel 6 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan Di Kota Pekalongan Tahun 2015	43

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan dapat diartikan sebagai adanya perubahan atau perkembangan dari satu periode ke periode berikutnya. Pada pembangunan manusia, maka hal tersebut masih relevan jika diartikan sebagai perubahan yang terjadi pada manusia, baik dilihat dari sisi ekonomi maupun sosial. Perubahan atau perkembangan manusia dari sisi ekonomi dan sosial ini, dapat dijadikan sebagai indikator. Selain hal tersebut, pembangunan manusia bisa juga mencakup dimensi yang sangat luas, yang banyak sekali dipengaruhi oleh berbagai faktor dan berkontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia di suatu wilayah. Untuk itu, perlu telah dilakukan dengan untuk membuat suatu alat pengukuran yang dapat memberikan gambaran tentang dampak dari pembangunan manusia bagi penduduk dan sekaligus dapat memberikan gambaran tentang presentase pencapaian terhadap sasaran ideal.

Upaya pembuatan alat ukur tersebut, adalah dalam rangka mengetahui tingkat keberhasilan yang telah dicapai. Variabel-variabel sosial dan ekonomi disusun menjadi indeks komposit, sehingga dapat diperbandingkan satu dengan lainnya, atau antara satu periode dengan periode sebelumnya. Salah satu indeks komposit yang akan digunakan untuk mengukur pembangunan manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI).

IPM atau HDI mulai diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan terus dikembangkan di tahun 2015 sebagai alat untuk mengetahui indikator kesejahteraan manusia. Ada tiga dimensi yang akan digunakan untuk melihat kemajuan manusia yaitu berdasarkan dimensi kesehatan yang diukur dari Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH), dimensi pengetahuan yang diukur dari Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), serta dimensi standar hidup layak Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp).

IPM yang diukur (dengan ukuran angka-angka tertentu) menurut wilayah (kabupaten/kota) selama beberapa tahun, akan bermanfaat menjadi informasi atau masukan kepada pembuat keputusan dalam mencapai pembangunan manusia yang seutuhnya berdasarkan pada aspek keseimbangan, pemerataan, produktivitas dan pemberdayaan.

IPM yang merupakan salah satu alat ukur tersebut, diharapkan dapat menjadi alat untuk merangkum beberapa dimensi utama pembangunan manusia, yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Beberapa dimensi utama itu adalah kesehatan, pengetahuan dan standar hidup layak.

Dengan paradigma baru ini, pembangunan tidak lagi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi semata, tetapi sudah bergeser kearah pembangunan manusia secara utuh melalui pemberdayaan masyarakat itu sendiri.

Empat komponen kunci dari paradigma pembangunan manusia menurut UNDP (*United Nation Development Program*) yaitu:

1. Produktivitas (*productivity*), yaitu penduduk harus mampu meningkatkan produktivitas dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari penghasilan dan lapangan kerja.
2. Pemerataan (*Equity*), yaitu setiap penduduk harus mampu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap semua sumber daya ekonomi dan sosial.
3. Kestinambungan (*Sustainability*), yaitu akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial harus dipastikan tidak hanya untuk generasi sekarang saja, tetapi juga untuk generasi-generasi yang akan datang. Semua bentuk sumber daya fisik, manusia, alam harus dapat diperbarui.
4. Pemberdayaan (*Empowerment*), yaitu penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan dan proses yang akan menentukan (bentuk) kehidupan mereka, serta berpartisipasi dan mengambil manfaat dari proses pembangunan.

BAB. II

METODOLOGI

II.1 Konsep dan Definisi

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), adalah suatu indikator komposit tunggal yang dirangkum dari beberapa dimensi utama pembangunan manusia (dimensi kesehatan, pendidikan dan ekonomi) yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

Ratio jenis kelamin (Sex Ratio), adalah perbandingan antara penduduk laki-laki dan Perempuan dikalikan 100.

Angka ketergantungan (Dependency Ratio), adalah perbandingan antara penduduk usia 0-14 tahun dan usia diatas 65 tahun terhadap penduduk usia produktif (15-65 tahun).

Rata-rata Lama Sekolah (RLS), didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun atau lebih dalam menjalani pendidikan formal.

Harapan Lama Sekolah (HLS), didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada usia 7 tahun atau lebih di masa mendatang.

Angka Partisipasi Murni (APM) SD, adalah proporsi penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Dasar (SD).

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP, adalah proporsi penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Angka Partisipasi Murni (APM) SMU, adalah proporsi penduduk usia 16-18 tahun yang sedang bersekolah tingkat Sekolah Menengah Umum (SMU).

Jumlah penduduk usia sekolah, adalah banyaknya penduduk yang berusia 7 sampai 15 tahun.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), merupakan perbandingan angkatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun atau lebih.

Angka Pengangguran Terbuka, adalah perbandingan penduduk yang mencari kerja terhadap angkatan kerja .

Persentase Pekerja yang setengah menganggur, adalah proporsi penduduk usia 15 tahun atau lebih yang bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu.

Angka Harapan Hidup Waktu Lahir, merupakan hasil perkiraan rata-rata lamanya hidup sejak lahir yang akan dicapai oleh sekelompok penduduk.

Angka Kesakitan Sesaat (Point Prevalency), adalah proporsi penduduk yang mengalami keluhan kesehatan.

Penduduk per Puskesmas, adalah perbandingan jumlah penduduk dengan jumlah puskesmas.

II.2 Indikator dan Variabel

Indikator dan variabel yang dipakai dalam IPM adalah variabel-variabel yang menunjukkan kualitas sumber daya manusia dalam beberapa dimensi utama, yaitu ekonomi, kesehatan dan pendidikan sebagai berikut :

- ***Indikator Kesehatan:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Angka Harapan Hidup saat lahir (AHH) dalam satuan tahun.

- ***Indikator Pengetahuan:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun atau lebih dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun atau lebih, dalam satuan tahun.

- ***Indikator Standar Hidup Layak:***

Variabel yang dipakai dalam indikator ini adalah Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)

II.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan IPM ini adalah data olahan yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2015.

II.4 Metode Penghitungan IPM

IPM disusun dari tiga komponen yaitu: komponen kesehatan, diukur dengan angka harapan hidup pada saat lahir; komponen pengetahuan, diukur dengan kombinasi antara angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah; serta komponen standar hidup layak, diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan *Purchasing Power Parity* (PPP rupiah). Pembangunan manusia yang berhasil akan membuat usia rata-rata masyarakatnya meningkat, dan peningkatan pengetahuan yang bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pencapaian dua hal tersebut selanjutnya akan meningkatkan produktivitas, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan mutu hidup dalam arti hidup layak.

a. Komponen Kesehatan

Kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama diukur dengan indikator harapan hidup pada saat lahir (*life expectancy at birth/e₀*). Angka e_0 untuk tingkat propinsi yang disajikan pada tulisan ini, merupakan hasil penghitungan tidak langsung (*indirect technique*) dengan menggunakan paket program Mortpack berdasarkan data rata-rata jumlah anak lahir hidup dan rata-rata jumlah anak masih hidup menurut kelompok umur ibu 15-49 tahun, dan dengan memperhatikan trend data hasil Sensus Penduduk, dan Survei Penduduk Antar Sensus (Supas).

b. Komponen Pengetahuan

Komponen pengetahuan diukur dari dua indikator, yaitu angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah (*EYS/Expected Years of Schooling*) didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 tahun atau lebih di masa mendatang. Rata-rata lamanya sekolah (*MYS/Mean Year of Schooling*), didefinisikan sebagai jumlah tahun

yang digunakan oleh penduduk berusia 25 tahun atau lebih dalam menjalani pendidikan formal.

c. Komponen Standar Hidup Layak (*decent standard of living*)

Komponen standar hidup layak merupakan komponen ketiga selain dua komponen diatas yang juga diakui secara luas sebagai unsur dasar pembangunan manusia. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan GDP ril per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak, BPS dalam menghitung daya beli ini menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang disesuaikan dengan formula Atkinson.

Masing-masing komponen tersebut terlebih dahulu dihitung indeksnya, sehingga bernilai antara 0 (keadaan terburuk) dan 1 (keadaan terbaik). Untuk mempermudah penafsiran, indeks tersebut dinyatakan dalam ratusan (dikalikan 100).

Berdasarkan nilai IPM yang diperoleh untuk masing-masing daerah/wilayah maka dapat dilakukan analisis lebih lanjut, diantaranya yaitu tingkat status pembangunan manusia dan tingkat pertumbuhan IPM.

Komponen IPM adalah tingkat usia hidup manusia (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) dan standar hidup layak (*decent living*). Dalam pembangunan manusia, yang pertama dilakukan adalah mengusahakan agar penduduk dapat mencapai “usia hidup” (*longevity*) yang panjang dan sehat. Usia hidup menurut UNDP diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*Life Expectancy at Birth*) yang dinotasikan dengan e_0 . e_0 ini dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode brass, varian trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen kedua dalam pembangunan manusia adalah komponen pengetahuan (*knowledge*). Komponen itu diukur dengan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas KOR. Indikator angka harapan lama sekolah diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara

simultan yaitu tingkat/kelas yang sedang/pekerjaan pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan .

Komponen ketiga dalam pembangunan manusia adalah komponen daya beli masyarakat, yang diukur dengan indikator rata-rata konsumsi ril yang telah disesuaikan. Ada beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur komponen ini, namun dengan mempertimbangkan ketersediaan data secara internasional, UNDP menggunakan indikator PDB perkapita ril yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per Capita*) sebagai ukuran komponen tersebut.

Kemudian untuk keperluan IPM Kabupaten/Kota, data dasar PDRB per kapita tidak dapat digunakan untuk mengukur daya beli, karena bukan ukuran yang peka untuk mengukur daya beli penduduk. Sebagai pengganti ukuran tersebut, digunakan ukuran konsumsi perkapita ril yang telah disesuaikan. Sumber data yang telah digunakan adalah *raw data* Susenas Modul Konsumsi.

Adapun tahapan perhitungan indikator konsumsi ril per kapita yang telah disesuaikan sebagai berikut :

- Menghitung pengeluaran konsumsi per kapita dari Susenas Modul (= **A**)
- Mendeflasikan nilai A dengan IHK provinsi yang sesuai (= **B**)
- Menghitung daya beli per unit (= **PPP/unit**). Metode perhitungan sama seperti metode yang digunakan Internasional Comparision Project (**ICP**) dalam menstandarkan nilai PDB suatu negara. Data dasar yang digunakan adalah data harga dan kuantum dari suatu basket komoditi yang terdiri dari nilai 27 komoditi yang diperoleh dari Susenas Modul Konsumsi.
- Membagi nilai B dengan PPP/ unit (= **C**)
- Menyesuaikan nilai C dengan formula *Atkinson* sebagai upaya untuk memperkirakan nilai marginal utility dari C

- Perhitungan PPP/ unit dilakukan dengan rumus :

$$PPP / Unit = \frac{\sum_i E(i, j)}{\sum P(i, j)Q(i, j)}$$

keterangan :

E(ij) : Pengeluaran untuk komoditi j

P(ij) : Harga komoditi j

Q(ij) : Jumlah komoditi j (unit) yang dikonsumsi

Rumus Atkinson yang digunakan untuk penyesuaian rata-rata konsumsi riil secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} C_{(i)}^* &= C_{(i)} && \text{, jika } C_{(i)} \leq Z \\ &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{1/2} && \text{, jika } Z < C_{(i)} \leq 2Z \\ &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(C_{(i)} - 2Z) && \text{, jika } 2Z < C_{(i)} \leq 3Z \\ &= Z + 2(Z)^{1/2} + 3(Z) + 4(C_{(i)} - 3Z)^{1/4} && \text{, jika } 3Z < C_{(i)} \leq 4Z \end{aligned}$$

keterangan :

$C_{(i)}$: Konsumsi perkapita riil yang telah disesuaikan dengan PPP/unit (hasil tahapan 5)

Z : *Thres hold* atau tingkat pendapatan tertentu yang digunakan sebagai batas kecukupan yang ditetapkan secara arbiter Rp 547.500,- per kapita setahun atau Rp. 1.500 per kapita perhari.

Indeks komponen IPM, merupakan perbandingan antara selisih nilai suatu indikator dan nilai minimumnya dengan selisih nilai maksimumnya dan nilai minimum indikator tersebut. Rumusnya dapat disajikan sebagai berikut :

$$\text{Indeks } X_{(i)} = [X_{(i)} - X_{(i) \min}] / [X_{(i) \max} - X_{(i) \min}]$$

keterangan :

$X_{(i)}$: indikator ke-i (i=1,2,3,..)

$X_{(i) \max}$: Nilai Maksimum $X_{(i)}$

$X_{(i) \min}$: Nilai Minimum $X_{(i)}$

Nilai maksimum dan minimum indikator $X_{(i)}$ disajikan pada Tabel 1.

**Tabel : 2.1. Nilai Maksimum dan Minimum
Komponen IPM**

Indikator	Satuan	Minimum		Maksimum	
		UNDP	BPS	UNDP	BPS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka Harapan Saat Lahir	Tahun	20	20	85	85
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	0	0	18	18
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	0	0	15	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP US\$)	1.007.436 * (Rp)	107.721 (PPP US\$)	26.572.352 ** (Rp)

Keterangan:

* Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua

** Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

Rumus perhitungan IPM

Rumus perhitungan IPM disajikan sebagai berikut :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

keterangan :

X₍₁₎ : Indeks Kesehatan

X₍₂₎ : Indeks Pengetahuan/Pendidikan

X₍₃₎ : Indeks Standar Hidup Layak

Hasil perhitungan IPM memberikan gambaran seberapa jauh suatu wilayah telah mencapai sasaran yang disentuh, yaitu angka harapan hidup 85 tahun. Pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali dan tingkat daya beli yang telah mencapai standar hidup layak. Semakin dekat IPM suatu wilayah terhadap angka 100 maka semakin dekat dengan sasaran yang dicapai.

Dalam memahami makna nilai PBB melalui UNDP (*United Nation Depeloment Programme*) memberikan kualitas tingkat status yakni:

Tabel : 2.2. Besaran Nilai IPM dan Statusnya

Tingkat Status	Kriteria
(1)	(2)
Rendah	IPM < 60
Sedang	60 ≤ IPM < 70
Tinggi	70 ≤ IPM < 80
Sangat Tinggi	IPM ≥ 80

Perhitungan Kecepatan Perkembangan IPM

Dalam menghitung kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu tertentu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Secara sederhana, hal ini untuk menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya.

Pertumbuhan IPM dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{(\text{IPM}_t - \text{IPM}_{t-1})}{\text{IPM}_{t-1}} \times 100$$

yaitu :

IPM_t = IPM suatu wilayah pada tahun t

IPM_{t-1} = IPM suatu wilayah pada tahun (t-1)

Kemudian dalam menghitung masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

a) Angka Harapan Hidup (e_0)

Menurut UNDP usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*Life Expectancy at Birth*). yang biasa dinotasikan dengan e_0 Karena di Indonesia tidak memiliki sistem registrasi langsung, maka digunakan metode ini dengan memakai dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup/ALH (*live births*) dan rata-rata anak yang masih hidup/AMH (*still living*) Per wanita 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan perhitungan e_0 dilakukan dengan menggunakan *software mortpack*.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)

Kedua indikator pendidikan ini dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan .

b.1) Penghitungan Harapan Lama Sekolah (HLS/EYS) adalah sebagai berikut :

$$\text{HLS}_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t} \quad \text{dimana:}$$

HLS_a^t adalah Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t

E_i^t adalah Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t

P_i^t adalah Jumlah penduduk usia i pada tahun t

i adalah Usia ($a, a+1, \dots, n$)

b.2) Penghitungan Rata-rata Lama Sekolah (RLS/MYS)

- **Langkah Pertama**, menyeleksi penduduk pada usia 25th ke atas.
- **Langkah Kedua**, menghitung lamanya sekolah.
 - Jika partisipasi sekolah yaitu **tidak/belum pernah bersekolah**, maka **lama sekolah = 0**.
 - Jika partisipasi sekolah yaitu **masih bersekolah** atau **tidak bersekolah lagi**, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut.

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 yang tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

- **Langkah Ketiga**, menghitung rata-rata lama sekolah

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

RLS : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk_i: lama sekolah penduduk ke-*i* di suatu wilayah

n: jumlah penduduk ($i = 1, 2, 3, \dots, n$)

Tabel : 2.3. Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Tahun Lama Sekolah (Tahun)
(1)	(2)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMALB/MA/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

c) Kemampuan Daya Beli

Ukuran pantas daya beli menggunakan variabel *purchasing power parity*, karena secara konseptual jelas lebih lengkap dalam penyeleksian taraf pembangunan manusia,. Ukuran yang digunakan dalam hal ini adalah konsumsi per kapital ril yang telah disesuaikan. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah data Susenas 2015.

1. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dari Susenas

- **Langkah Pertama**, hitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.

- **Langkah Kedua**, hitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.
- **Langkah Ketiga**, menghitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalam ribuan (\bar{Y}_t) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan x 12 / 1000.

2. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dalam Harga Konstan (riil)

- Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{\bar{Y}_t}{IHK(t,2012)} \times 100$$

Y_t^* = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

\bar{Y}_t = Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK(t,2012)$ = IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

3. Menghitung Paritas Daya Beli/*Purchasing Power Parity* (PPP)

- **Langkah Pertama**, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih.

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}, \text{Keterangan:}$$

- P_i = Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah
- V_i = Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah
- Q_i = Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi di suatu wilayah
- Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK.

- **Langkah Kedua**, menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$\text{ParitasDayaBeli}_j = \prod_{i=1}^m \left(\frac{P_{ij}}{P_{ik}} \right)^{1/m}$$

p_{ij} : harga komoditas i di Jakarta Selatan

p_{ik} : harga komoditas i di kab/kota j

m : jumlah komoditas

- **Langkah Ketiga**, menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{\text{ParitasDayaBeli}}$$

Y_t^{**} : Rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^* : Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH

III.1 Kondisi Geografis

Kota Pekalongan terletak antara 6 50' 42" - 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" - 109 42' 19" Bujur Timur

Secara administrasi, wilayah Kota Pekalongan mempunyai batas-batas :

- Bagian utara : Laut Jawa
- Bagian Selatan : Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang
- Bagian Barat : Kabupaten Pekalongan
- Bagian Timur : Kabupaten Batang

Kota Pekalongan memiliki ketinggian kurang lebih 1 meter dari permukaan laut. Di wilayah sebelah utara merupakan daerah pantai, sedangkan wilayah bagian tengah merupakan daerah dataran.

Kota Pekalongan memiliki luas wilayah 45,25 km², yang terdiri dari tanah sawah seluas 12,38 km² (27,36 persen) dan tanah kering seluas 32,87 km² (72,64 persen). Wilayah administrasi Kota Pekalongan terbagi menjadi 4 kecamatan dan 27 kelurahan.

III.2 Kependudukan

Penduduk merupakan sasaran utama pembangunan manusia, sehingga data kependudukan menjadi sangat vital dalam penentuan kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia. Jumlah penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015 adalah 296.533 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 148.295 jiwa dan perempuan sebanyak 148.238 jiwa. *Sex* rasio sebesar 100,04 menunjukkan perbandingan bahwa penduduk perempuan sebanyak 100 jiwa maka terdapat jumlah penduduk laki-laki sebanyak 100 jiwa. Kepadatan penduduk rata-rata sebesar 6.554 jiwa/Km² yang angka ini menunjukkan bahwa rata-rata jumlah penduduk pada tiap km² sebanyak 6.554 orang. Sedangkan laju pertumbuhan penduduknya sebesar 0,96%, yang berarti ada penambahan penduduk kira-kira 1 orang pada tiap 100 orang penduduk di setiap tahunnya.

Penduduk menurut kelompok umur akan dapat memberikan gambaran tentang kejadian demografis (fertilitas, mortalitas dan migrasi). Hasil pengumpulan data penduduk tahun 2015 menunjukkan bahwa persentase penduduk usia muda (0-14 tahun) sebesar 76.147 jiwa atau 25,68%. Pada penduduk usia muda tersebut diatas, terdapat penduduk balita (0-4 tahun) sebesar 25.082 jiwa atau sebesar 8,46% dari jumlah penduduk. Sedangkan penduduk pada kelompok lanjut usia (lansia) yaitu penduduk berusia 65 tahun atau lebih mencapai 14.124 jiwa atau 4,76%. Usia produktif (umur 15-64) penduduk Kota Pekalongan mencapai 69,56% atau sebanyak 206.262 jiwa. Dari keadaan ini dapat diketahui bahwa penduduk Kota Pekalongan dikategorikan sebagai penduduk usia muda.

BAB IV

ANALISIS PEMBANGUNAN MANUSIA

Manusia adalah merupakan modal pembangunan bangsa. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk manusia itu sendiri, dengan menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi tiap manusia atau rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat dan menjalankan kehidupan yang produktif.

Peningkatan pembangunan manusia dapat dilakukan melalui pendekatan kondisi kesehatan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk penghasilan dan pendapatan keluarga. Pendidikan dan kualitas individu yang berkaitan dengan tradisi, norma, produktifitas dan perilaku kehidupan, serta peningkatan usaha kesejahteraan lainnya, baik manusia sebagai diri pribadi, keluarga, masyarakat, warga negara, dan himpunan kualitas secara menyeluruh, yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun keluarga.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dalam bab ini dibahas tentang indikator pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan, yang selanjutnya akan dikaitkan dengan hasil keadaan manusia di Kota Pekalongan. Indikator tersebut diharapkan akan dapat mengetahui sejauh mana keadaan hasil pembangunan sumber daya manusia di Kota Pekalongan selama periode 2011 – 2015.

IV.1 Indikator Pendidikan

Dalam perkembangan negara-negara di dunia menunjukkan bahwa keunggulan suatu bangsa, tidak semata-mata bergantung pada keunggulan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya, melainkan oleh keunggulan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengolah dan memanfaatkan sumber daya alamnya. Oleh karena itu dalam kerangka pengembangan sumber daya manusia yang unggul, penyelenggaraan pendidikan yang merata, bermutu, relevan dan efisien, merupakan upaya yang strategis dan mendasar.

Dalam melaksanakan pembangunan pendidikan nasional, pemerintah telah menyusun serangkaian kebijakan, salah satu diantaranya adalah pelaksanaan “Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun“. Dengan kebijakan/program tersebut diharapkan kualitas SDM dapat ditingkatkan, sehingga dapat memberi nilai lebih berkualitas terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, peningkatan wajib belajar dari 6 (enam) tahun menjadi 9 (sembilan) tahun akan memberi kematangan lebih tinggi dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan.

Upaya peningkatan pembangunan pendidikan memerlukan data yang akurat, agar diketahui berbagai macam keadaan yang mendasari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kegiatan peningkatan pembangunan pendidikan. Data yang dimaksud merupakan indikator pendidikan, karena berfungsi memberikan indikasi atau petunjuk tentang berbagai macam dan jenis keadaan yang dimaksud.

Kaitannya dengan upaya peningkatan pembangunan manusia melalui program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun, dengan indikator yang dapat digunakan untuk memantau keberhasilan antara lain Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lamanya Sekolah, Jenjang Pendidikan Yang Ditamatkan, Fasilitas Pendidikan, Rasio Murid-Guru dan Rasio murid per sekolah.

IV.1.1 Harapan Lama Sekolah

Salah satu variabel dari komponen IPM adalah angka harapan lama sekolah, yang bertitik tolak pada upaya pembangunan bidang pendidikan. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada penduduk berusia 7 tahun atau lebih karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar.

Untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren yang datanya bersumber dari Direktorat Pendidikan Islam, Kementerian Agama.

Tabel 4.1 Harapan Lama Sekolah (HLS)
Di eks Karesidenan Pekalongan

Daerah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
a. Kab. Batang	10,32	10,43	10,45	10,65	11,09
b. Kab. Pekalongan	10,99	11,17	11,55	11,93	12,00
c. Kab. Pemalang	10,45	10,64	11,05	11,26	11,86
d. Kab. Tegal	10,90	11,16	11,63	11,99	12,00
e. Kab. Brebes	10,48	10,51	10,75	11,03	11,34
f. Kota Pekalongan	11,05	11,13	11,56	11,93	12,59
g. Kota Tegal	11,24	11,33	11,61	11,96	12,46

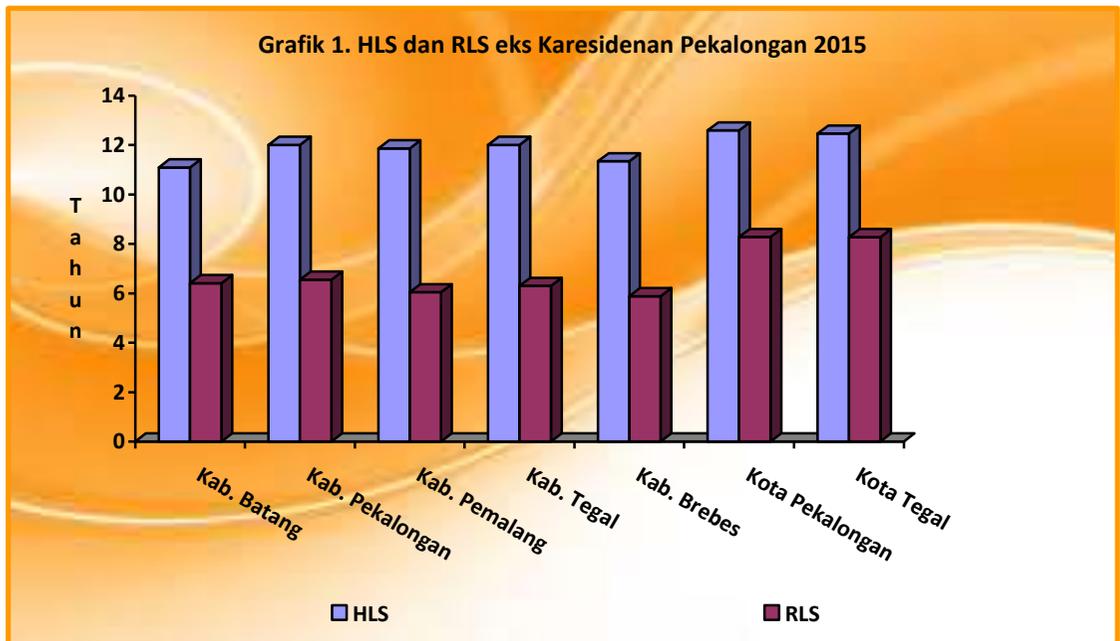
Perkembangan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kota Pekalongan selama periode tahun 2011 – 2015 menunjukkan adanya peningkatan sebesar 13,94 persen. Pada tahun 2011, angka Harapan Lama Sekolah sudah mencapai 11,05 tahun, kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 12,59 tahun atau tiap tahunnya angka Harapan Lama Sekolah selama periode 2011 – 2015 meningkat 2,79 persen/tahun.

Secara umum, angka Harapan Lama Sekolah Kota Pekalongan masih tertinggi bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain yang ada di eks Karesidenan Pekalongan.

IV.1.2 Rata-rata Lama Sekolah

Selain angka harapan lama sekolah, komponen IPM berupa tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah, dapat dilihat dari rata-rata lama bersekolah (RLS) (tahun). Indikator ini menunjukkan sampai pada jenjang pendidikan apa secara umum tingkat pendidikan penduduk dewasa di Kota Pekalongan.

Berdasarkan data dari Susenas tahun 2015, angka rata-rata lama sekolah mencapai 8,28 tahun, angka ini berarti bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk berusia 25 tahun atau lebih di Kota Pekalongan dapat menyelesaikan sekolah hanya sampai kelas 2 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama/SLTP. Angka ini mengalami sedikit peningkatan sebesar 1,97 persen dibanding tahun 2014 lalu. Namun demikian, untuk mencapai target rata-rata lama bersekolah 9 tahun maka masih dibutuhkan upaya lebih keras lagi dari pemerintah daerah Kota Pekalongan untuk mencapai target tersebut. Tercatat, upaya yang telah ditempuh adalah bahwa pendidikan warga Kota Pekalongan mulai pada usia dini telah diwujudkan pada setiap wilayah di tingkat Rukun Warga (RW) dibentuk pendidikan anak usia dini (PAUD). Selain itu, adanya kewajiban tiap sekolah untuk menerima murid yang berasal dari warga yang tidak mampu (akan dibiayai sepenuhnya oleh Pemkot Pekalongan). Hal ini diharapkan akan dapat mendorong angka rata-rata lama sekolah ini. Hal lain adalah perlu membuat perangkat atau aturan dan petunjuk teknisnya, untuk mendorong setiap warga Kota Pekalongan berusia sekolah untuk bersekolah, minimal menyelesaikan pendidikannya selama 9 tahun.



IV.1.3 Tingkat Partisipasi Sekolah

Pembangunan bidang pendidikan bertujuan untuk meningkatkan akses penduduk pada fasilitas pendidikan, sehingga akan semakin banyak penduduk yang dapat bersekolah. Angka partisipasi sekolah diartikan sebagai perbandingan antara banyaknya penduduk yang masih bersekolah pada kelompok usia sekolah tertentu, dibagi dengan jumlah penduduk yang seharusnya masih sekolah pada kelompok usia yang sama.

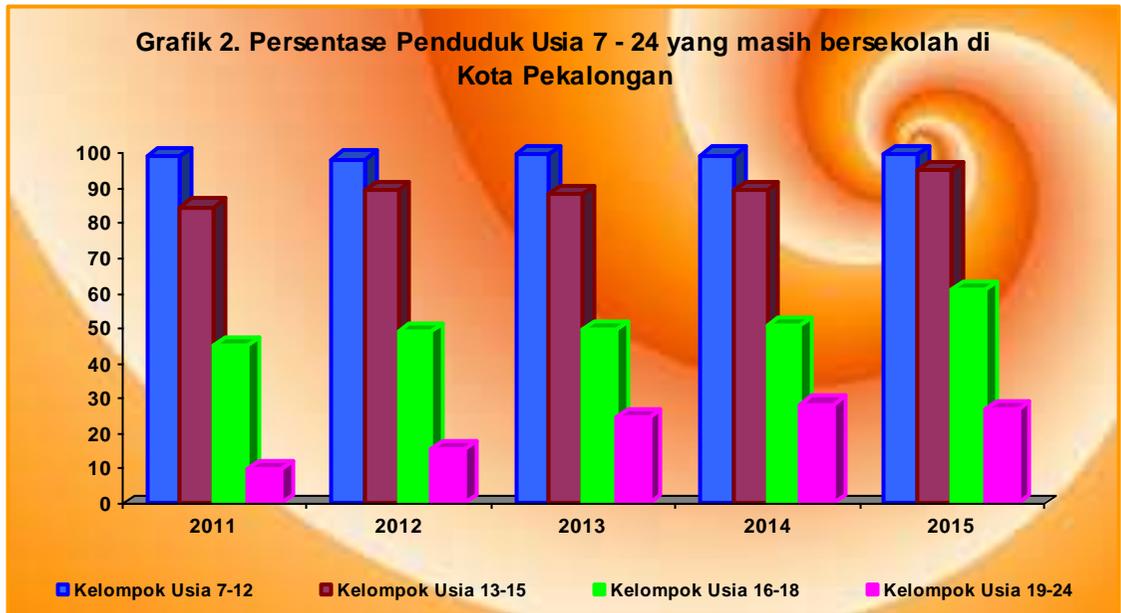
Tabel 4.2 Persentase Penduduk Usia 7 – 24 Tahun Yang Berstatus Masih Sekolah Di Kota Pekalongan Tahun 2011-2015

Kelompok Usia	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 – 12	98,87	98,11	99,65	99,24	99,50
13 – 15	84,36	89,15	88,17	89,33	95,06
16 – 18	44,85	48,84	49,45	50,65	60,66
19 – 24	9,71	15,26	24,42	28,13	26,68

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan tahun 2015

Tabel 4.2 menunjukkan bahwa di Kota Pekalongan pada tahun 2015 untuk tingkat sekolah dasar, ada sebanyak 99,50 persen penduduk usia 7 – 12 tahun (usia sekolah dasar) telah bersekolah, angka ini bertambah sebesar 0,26 persen bila dibandingkan tahun 2014 yang sudah mencapai 99,24 persen. Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu tingkat SLTP, tingkat partisipasi sekolah penduduk usia 13 – 15 tahun pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 6,41 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 angka partisipasi sekolah usia 13 – 15 tahun telah mencapai 89,33 persen, dan pada tahun 2015 naik menjadi 95,06 persen. Hal yang sama juga terjadi pada penduduk yang bersekolah pada jenjang pendidikan menengah atas (usia 16 – 18 tahun), yakni menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2014 angka partisipasi sekolah untuk usia 16 – 18 tahun mencapai sebesar 50,65 persen dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 60,66 persen atau mengalami peningkatan sebesar 19,76 persen. Untuk tingkat pendidikan

tinggi, pada tahun 2015 penduduk kota Pekalongan yang masih kuliah sudah mencapai 26,68 persen. Angka ini mengalami penurunan jika dibandingkan angka pada akhir tahun 2014 yang telah mencapai 28,13 persen.



IV.1.4 Fasilitas Pendidikan

Keberadaan serta kemudahan akses terhadap fasilitas pendidikan berperan penting dalam peningkatan hasil pembangunan di bidang pendidikan. Salah satu sarana yang penting adalah sekolah yang merupakan wahana penyelenggaraan kegiatan pendidikan formal. Fasilitas pendidikan yang memadai sangat diperlukan dengan mendukung visi dan misi pembangunan pendidikan, yaitu memperluas kesempatan belajar bagi semua penduduk, mempunyai hak yang sama untuk memperoleh keterampilan untuk kehidupan, serta sekaligus terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian, pemerintah perlu menyediakan sarana belajar antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah baru, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, dan penambahan jumlah pendidik yang berkualitas.

Tabel 4.3 Banyaknya Fasilitas Pendidikan dan Rasio
Antara Murid Terhadap Guru dan Sekolah
Di Kota Pekalongan

Tingkat Pendidikan	2014	2015	Perubahan (%)
1. SD/MI			
- Jumlah Sekolah	242	145	59,92
- Jumlah Murid	40.498	32.631	80,57
- Jumlah Guru	2.762	2.003	72,52
- Rasio Murid/Guru	14,66	16,29	111,11
- Rasio Murid/Sekolah	167,35	225,04	134,48
2. SLTP Sederajat			
- Jumlah Sekolah	36	38	105,56
- Jumlah Murid	16.524	16.447	99,53
- Jumlah Guru	965	997	103,32
- Rasio Murid/Guru	17,12	16,50	96,34
- Rasio Murid/Sekolah	459,00	432,82	94,30
3. SMU Sederajat			
- Jumlah Sekolah	28	30	107,14
- Jumlah Murid	14.704	15.272	103,86
- Jumlah Guru	1.178	1.059	89,90
- Rasio Murid/Guru	12,48	14,42	115,53
- Rasio Murid/Sekolah	525,14	509,07	96,94

Pada Tabel 4.3 menunjukkan adanya perkembangan jumlah fasilitas pendidikan di Kota Pekalongan pada periode 2014 – 2015. Jumlah fasilitas pendidikan di Kota Pekalongan pada Tahun 2015 untuk sekolah SD/MI sebanyak 145, Sekolah SLTP/ sederajat 38 sekolah dan sekolah SLTA/ sederajat 30.

Pada jenjang pendidikan tingkat SD, jumlah murid SD atau sekolah yang sederajat pada tahun 2015 berkurang 19,43 persen dibanding tahun 2014, demikian juga dengan jumlah guru yang mengalami pengurangan sebanyak 27,48 persen untuk periode yang sama. Rasio antara murid-guru pada tahun 2014 tercatat sebesar 14,66 kemudian pada tahun 2015 tercatat sebesar 16,29 yang berarti bahwa beban seorang guru mengajar

mengalami peningkatan yaitu semula tahun 2014 mengajar 14 orang murid kemudian tahun 2015 mengajar 16 orang murid. Demikian pula pada rasio murid-sekolah, pada tahun 2014 tercatat sebesar 167,35 dan tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 225,04 hal ini berarti bahwa setiap sekolah dasar pada tahun 2014 menampung 167 orang kemudian pada tahun 2015 meningkat menjadi 225 orang murid.

Pada jenjang pendidikan tingkat SLTP, jumlah murid SLTP atau sekolah yang sederajat pada tahun 2015 berkurang 0,47 persen dibanding tahun 2014. Namun disisi lain, jumlah guru bertambah 3,32 persen dibanding dengan tahun 2014. Rasio antara murid-guru pada tahun 2014 tercatat sebesar 17,12 yang kemudian pada tahun 2015 tercatat sebesar 16,50 yang hal ini berarti adanya pengurangan beban seorang guru semula mengajar 17 orang murid kemudian menjadi mengajar 16 orang murid. Pada rasio murid-sekolah, pada tahun 2014 adalah tercatat sebesar 459,00 kemudian pada tahun 2015 menjadi 432,82 yang berarti bahwa setiap sekolah lanjutan tingkat pertama mengalami pengurangan murid, yaitu semula menampung 459 orang murid kemudian menjadi 432 orang murid.

Pada jenjang pendidikan tingkat SLTA, jumlah murid SMU atau sekolah yang sederajat pada tahun 2015 bertambah 3,86 persen dibanding tahun 2014, tetapi disisi lain, jumlah guru mengalami pengurangan personil yang cukup banyak yakni sebanyak 119 guru atau 10,10 persen untuk periode yang sama. Rasio antara murid-guru tercatat pada tahun 2014 sebanyak 12,48 kemudian tahun 2015 menjadi 14,42 yang hal ini berarti bahwa beban seorang guru mengajar menjadi meningkat, yaitu semula 12 orang murid menjadi 14 orang murid. Pada rasio murid-sekolah, pada tahun 2014 tercatat sebesar 525,14 kemudian pada tahun 2015 menjadi 509,07 yang hal ini berarti bahwa setiap sekolah lanjutan tingkat atas mengalami pengurangan murid, yaitu semula menampung sebanyak 525 orang murid kemudian menjadi 509 orang murid.

IV.2 Indikator Kesehatan

Peningkatan kualitas kesehatan penduduk merupakan salah satu aspek dalam upaya Peningkatan pembangunan manusia. Peningkatan kualitas kesehatan penduduk secara fisik, dapat dilihat dari derajat kesehatan penduduk secara keseluruhan. Indikator utama yang dipakai untuk melihat derajat kesehatan adalah angka harapan hidup dan angka kematian bayi. Selain derajat kesehatan, aspek penting yang lain dari kualitas kesehatan penduduk adalah status kesehatan, yang antara lain dapat diukur dari angka kesakitan. Di samping itu, dalam sub bab ini dibahas masalah penyediaan sarana dan prasarana fasilitas kesehatan.

IV.2.1 Derajat Kesehatan Masyarakat

Derajat kesehatan penduduk Kota Pekalongan pada periode 2011 – 2015 menunjukkan adanya peningkatan ke arah yang lebih baik. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka harapan hidup.

Tabel 4.4 Angka Harapan Hidup
Di eks Karesidenan Pekalongan

Daerah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
a. Kab. Batang	74,28	74,33	74,38	74,40	74,42
b. Kab. Pekalongan	73,15	73,23	73,30	73,33	73,35
c. Kab. Pemasang	72,37	72,48	72,59	72,64	72,77
d. Kab. Tegal	70,46	70,59	70,73	70,80	70,90
e. Kab. Brebes	67,46	67,63	67,81	67,90	68,20
f. Kota Pekalongan	73,96	74,01	74,06	74,09	74,11
g. Kota Tegal	73,91	73,98	74,06	74,10	74,12

Pada Tabel 4.4 diatas tercatat bahwa Angka Harapan Hidup di Kota Pekalongan pada periode 2011 – 2015, mengalami peningkatan dari 73,96 tahun menjadi 74,11 tahun, ini artinya bahwa, usia hidup penduduk Kota Pekalongan bertambah selama 0,15 tahun

atau bertambah 0,20 persen. Secara tidak langsung, hal ini merupakan petunjuk bahwa kualitas kesehatan penduduk Kota Pekalongan telah meningkat menjadi lebih baik. Semakin tinggi angka harapan hidup, berarti semakin tinggi pula kualitas hidup penduduk wilayah tersebut. Angka harapan hidup tahun 2015 di daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah eks Karesidenan Pekalongan, relatif bervariasi antara 68,20 sampai 74,42 tahun, yaitu Kabupaten Batang yang penduduknya memiliki harapan hidup tertinggi mencapai 74,42 tahun dan Kabupaten Brebes dengan penduduknya memiliki harapan hidup terendah, yaitu 68,20 tahun.

Angka kematian bayi di Kota Pekalongan pada tahun 2015 mencapai 9,80 setiap 1000 kelahiran hidup, angka ini menunjukkan adanya peningkatan secara kualitas karena adanya penurunan dalam jumlah kematian bayi, dibandingkan tahun 2014 yang sebesar 10,14 setiap 1000 kelahiran hidup.



IV.2.2 Fasilitas dan Sarana Kesehatan

Upaya pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan penduduk adalah dengan meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan. Pada Tabel 4.5 menunjukkan ketersediaan sarana kesehatan pada tahun 2014 – 2015. Pada tahun 2015, jumlah dokter sebanyak 294 orang, Rumah Sakit 8 unit, Puskesmas dan Pustu sebanyak 55 unit. Jika melihat keadaan pada tahun 2014, maka jumlah dokter jauh

bertambah sebanyak 157 orang, jumlah Rumah Sakit, Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Pustu tidak bertambah.

Rasio jumlah dokter terhadap penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2015 mencapai angka 1 : 1.008 jiwa, hal ini berarti bahwa seorang dokter melayani sekitar 1.008 penduduk. Angka ini sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2014 yang mencapai 1:2.143 yang artinya seorang dokter melayani 2.143 orang penduduk, sehingga dengan keadaan ini diharapkan masyarakat dapat terus lebih baik dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Tabel 4.5 Fasilitas Kesehatan dan Tenaga Kesehatan
Di Kota Pekalongan

Uraian	2014	2015	Perubahan (Point)
Rumah Sakit	7	7	100,00
Dokter	137	294	214,60
Pukesmas dan Pustu/Puskeliling	55	55	100,00
Rasio Dokter/Penduduk	2.143,82	1.008,62	47,05

IV.2.3 Indikator Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan merupakan aspek yang mendasar dalam pembangunan manusia, karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan, maka akan berdampak pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha, sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan. Oleh karenanya, salah satu sasaran utama pembangunan di bidang ketenagakerjaan adalah terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang memadai, sehingga dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar tenaga kerja.

IV.2.4 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Perkembangan ketenakerjaan di Kota Pekalongan, secara selintas dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan serta penduduk yang menganggur disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tabel 4.6 Jumlah Tenaga Kerja Penduduk Usia 15 Tahun ke atas
Di Kota Pekalongan 2011-2015

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Angkatan Kerja					
- Bekerja	65,28	64,32	63,12	65,56	64,70
- Mencari Kerja	5,13	5,17	3,52	3,76	2,77
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	70,41	69,49	66,64	69,32	67,47
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,29	7,44	5,28	5,42	4,10
Tingkat Kesempatan Kerja (TKK)	92,71	92,56	94,72	94,58	95,90

Pada Tabel 4.6 tercatat bahwa TPAK Kota Pekalongan pada tahun 2015 sebesar 67,47 persen lebih rendah dibanding di tahun 2014 yang telah mencapai 69,47 persen. Angka TPAK sebesar 67,47 persen berarti setiap 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar 67 orang sebagai angkatan kerja (yang bekerja, yang mencari pekerjaan, dan yang menganggur) dan sisanya 33 orang sebagai bukan angkatan kerja (yang sedang bersekolah, mengurus rumahtangga, sedang mengikuti pelatihan, dsb). Hal ini dapat juga mengindikasikan adanya penambahan jumlah penduduk terutama penduduk yang bersekolah dan penduduk yang mengurus rumahtangga, pada tahun 2015 sebanyak 33 orang, dibandingkan dengan tahun 2014 lalu yang berjumlah 31 orang yang merupakan penduduk bukan angkatan kerja dari 100 orang penduduk berusia kerja.

IV.2.5 Kesempatan Kerja dan Pengangguran

Banyaknya penduduk yang berada dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kesempatan kerja yang ada memberikan gambaran besarnya tingkat penyerapan pasar kerja, sehingga angkatan kerja yang tidak terserap merupakan masalah, sebab berarti mereka terpaksa menganggur. Tingkat kesempatan kerja diartikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja.

Pada Tabel 4.6 diatas tercatat bahwa Tingkat kesempatan kerja (TKK) dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2015 di Kota Pekalongan sebesar 95,90 persen, hal ini mengandung maksud bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat sekira 96 orang yang bekerja sedangkan sisanya sebanyak 4 orang menganggur. TKK merupakan kebalikan dari angka tingkat pengangguran terbuka. Tingkat pengangguran terbuka Kota Pekalongan pada tahun 2015 adalah sebesar 4,10 persen yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja maka ada 4 orang yang benar-benar tidak bekerja atau menganggur.

IV.3 Standar Hidup Layak

Standar Hidup Layak merupakan komponen ketiga selain dua komponen penghitungan IPM diatas, yang juga diakui secara luas sebagai unsur dasar pembangunan manusia. Berbeda dengan UNDP yang menggunakan GDP riil per kapita yang disesuaikan untuk mengukur standar hidup layak, BPS dalam menghitung standar hidup layak adalah melalui pengukuran daya beli penduduk yang menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang disesuaikan yaitu berupa paritas daya beli (*purchasing power parity PPP*).

- Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota.
- Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100
- Rata-rata pengeluaran per kapita konstan yang telah disesuaikan atau disebut sebagai paritas daya beli (*Purchasing Power Parity-PPP*).

Tabel 4.7 Angka Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Rp)
Di eks Karesidenan Pekalongan

Daerah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
a. Kab. Batang	7.609.690	7.821.370	7.966.910	8.011.690	8.244.000
b. Kab. Pekalongan	8.575.660	8.751.740	8.883.800	8.937.570	9.208.000
c. Kab. Pemalang	6.487.660	6.725.090	6.863.490	6.910.760	7.177.000
d. Kab. Tegal	7.713.160	7.894.250	8.001.080	8.049.700	8.367.000
e. Kab. Brebes	8.491.610	8.591.810	8.730.590	8.783.610	8.898.000
f. Kota Pekalongan	10.559.720	10.755.910	10.922.290	11.006.440	11.253.000
g. Kota Tegal	10.965.490	11.250.690	11.415.770	11.519.210	11.748.000

Pada Tabel 4.7 diatas tercatat bahwa daya beli masyarakat yang menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita ril yang telah disesuaikan untuk Kota Pekalongan pada tahun 2015 sebesar Rp 11.253.000,-. Angka tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2014 yang besarnya telah mencapai Rp 11.006.000,- mengalami kenaikan sebesar 2,24 persen.

Kemampuan daya beli masyarakat yang ada di daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah eks Karesidenan Pekalongan seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4.7 di atas menunjukkan adanya peningkatan walaupun tidak terlalu besar.

Kenaikan angka pengeluaran per kapita tahun 2015 yang mencapai 2,24 persen tidak sebanding dengan kenaikan inflasi yang terjadi antara tahun 2014 dan tahun 2015. Inflasi tahun 2015 sebesar 3,46 persen sedang inflasi tahun 2014 sebesar 7,82 persen sehingga terjadi penurunan inflasi sebesar 44,25 persen.

IV.3.1 Status Pembangunan Manusia

Pemerintah Daerah Kota Pekalongan telah berusaha dengan berbagai upaya dalam meningkatkan kondisi perekonomiannya, agar dapat lebih baik lagi dari pertumbuhan di masa-masa yang lalu.

Tahapan-tahapan pemulihan kondisi perekonomian telah dilakukan dan hasilnya pun mulai nampak. Kemajuan yang telah dicapai sebagai hasil pembangunan khususnya pembangunan manusia, dapat dilihat melalui besarnya IPM.

Dari hasil perhitungan IPM yang menggunakan 3 komponen indikator dan variabel pembangunan manusia, yaitu indikator pendidikan, kesehatan dan ekonomi, maka diperoleh angka dan posisi IPM Kota Pekalongan yang tercantum pada tabel di bawah ini

Tabel 4.8. Angka IPM Kota Pekalongan
Tahun 2011 – 2015

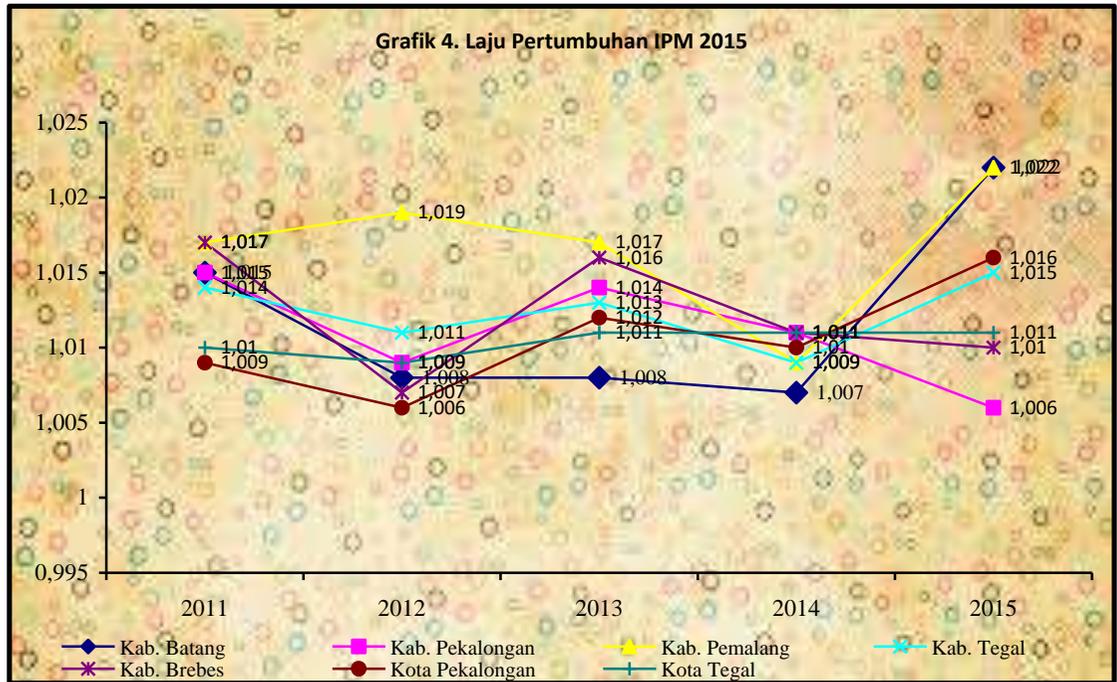
Tahun	Angka IPM	Peringkat Propinsi
(1)	(2)	(3)
2011	69.54	11
2012	69.95	11
2013	70.82	11
2014	71.53	11
2015	72,69	10

Pada tabel 4.7 memperlihatkan bahwa, peringkat IPM di Kota Pekalongan pada tahun 2015 berada pada posisi ke 10 dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Posisi tersebut lebih baik dibanding tahun 2014.

Angka IPM Kota Pekalongan periode 2011 – 2015 menunjukkan adanya peningkatan dari 69,54 pada tahun 2011 menjadi 72,69 pada tahun 2015. Status pembangunan manusia menurut UNDP, angka IPM Kota Pekalongan periode 2011 – 2015 masuk kategori tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$). Secara kualitas, pembangunan manusia di Kota Pekalongan di tahun 2015 masuk dalam kategori tinggi.

IV.3.2 Laju Pertumbuhan Pembangunan Manusia

Laju pertumbuhan pembangunan manusia dalam kurun waktu tertentu dapat diukur dengan membandingkan antara pencapaian yang telah diperoleh pada tahun t dengan capaian pada tahun sebelumnya ($t-1$) menuju titik ideal (IPM =100).



Laju pertumbuhan pembangunan manusia selama periode 2011 – 2015 di Kota Pekalongan cenderung meningkat kecuali kurun 2011-2012. Hal ini memberikan gambaran bahwa selama periode tahun 2011 – 2015 pembangunan manusia di Kota Pekalongan cenderung mengalami peningkatan. Adapun penyebabnya adalah adanya peningkatan daya beli masyarakat, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah serta angka harapan hidup di setiap tahunnya selama periode 2011 – 2015.

Pada periode tahun 2014 – 2015, akselerasi percepatan pembangunan manusia Kota Pekalongan mencapai 1,62 persen yang termasuk percepatan yang tinggi, dan ini lebih tinggi daripada akselerasi percepatan pembangunan manusia rata-rata se Jawa Tengah yang sudah mencapai 1,04 persen. Untuk wilayah se eks Karesidenan Pekalongan, pertumbuhan IPM Kota Pekalongan merupakan tertinggi ketiga, yaitu setelah

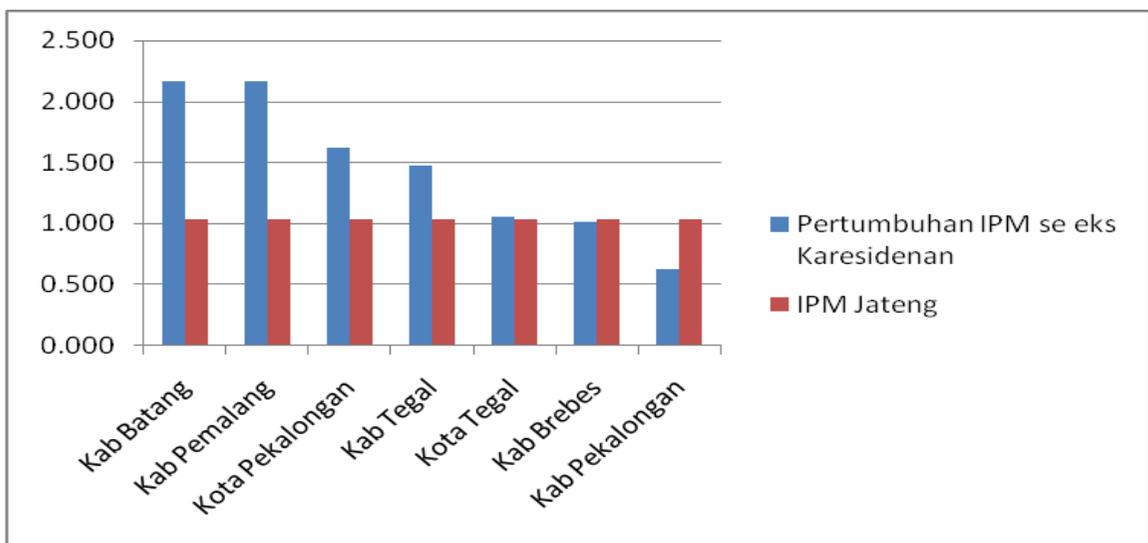
Kabupaten Batang sebesar 2,17 persen dan Kabupaten Pemalang sebesar 2,16 persen. Pada Tabel 4.8 dibawah ini adalah pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan wilayah eks Karesidenan Pekalongan

Tabel 4.8 Pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan eks Karesidenan Pekalongan 2015

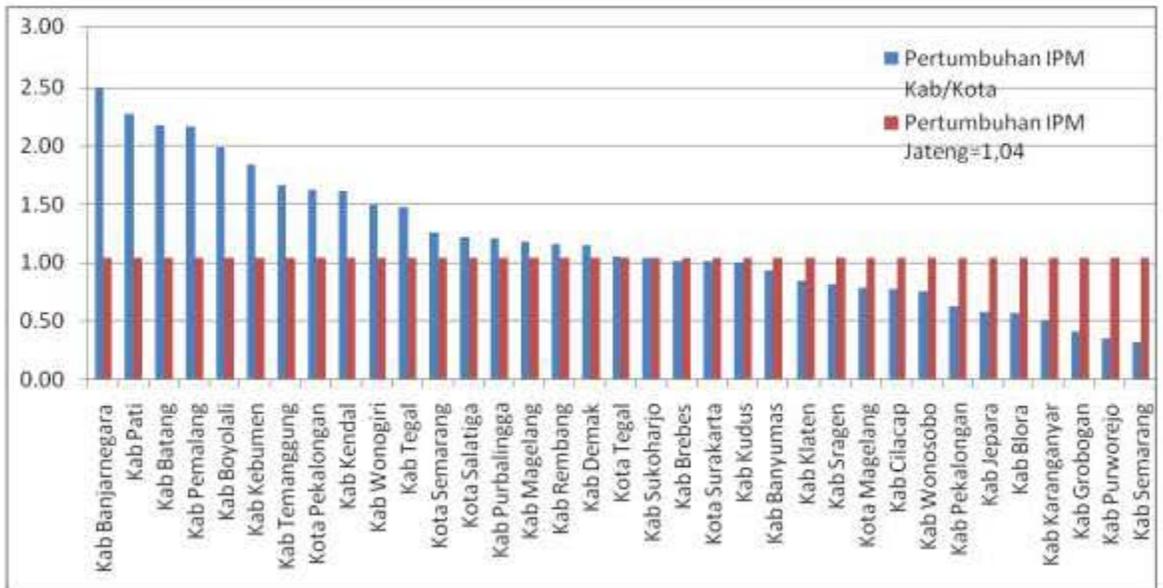
Prov/Kab/Kota	Pertumbuhan
Jawa Tengah	1,04
Kabupaten Batang	2,17
Kabupaten Pemalang	2,16
Kota Pekalongan	1,62
Kabupaten Tegal	1,47
Kota Tegal	1,06
Kabupaten Brebes	1,02
Kabupaten Pekalongan	0,63

Untuk lebih jelasnya, pertumbuhan tersebut dapat dilihat pada Grafik 5 di bawah ini dan Grafik 6 yang menggambarkan pertumbuhan IPM se Jawa Tengah, dengan 18 Kabupaten/Kota saja yang pertumbuhannya lebih baik dari rata-rata se Jawa Tengah.

Grafik 5. Pertumbuhan IPM Jawa Tengah dan eks Karesidenan Pekalongan Tahun 2015



Grafik 6. Pertumbuhan IPM Kabupaten/Kota se Jawa Tengah 2015



BAB V. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Nilai indeks pembangunan manusia di Kota Pekalongan pada tahun 2015 mengalami peningkatan yang cukup tinggi, yaitu sebesar 1,62 persen, yang pada tahun 2014 sebesar 71,53 meningkat pada tahun 2015 menjadi sebesar 72,69 dan merupakan salah satu dari 18 Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan yang lebih tinggi dari rata-rata se Jawa Tengah sebesar 1,04 persen.
- b. Komponen IPM di bidang pendidikan adalah yang mengalami peningkatan paling pesat, khususnya Harapan Lama Sekolah (HLS), yaitu tahun 2015 menjadi 12,59 tahun, yang berarti harapan penduduk kota Pekalongan untuk bersekolah adalah hingga perguruan tinggi. Namun demikian, untuk angka rata-rata lama sekolah (RLS) pada tahun 2015 adalah sebesar 8,28 tahun atau berarti penduduk kota Pekalongan rata-rata berpendidikan hingga kelas 2 SLTP.
- c. Komponen IPM di bidang kesehatan, yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) juga mengalami peningkatan, hingga pada tahun 2015 mencapai 74,11 tahun. Yang berarti penduduk kota Pekalongan memiliki harapan hidup hingga berusia 74 tahun lebih.
- d. Komponen IPM di bidang ekonomi, yang menggambarkan daya beli penduduk atau kemampuan belanja penduduk, melalui pendekatan pengeluaran per kapita yang disesuaikan, memperlihatkan adanya tren peningkatan tiap tahunnya, hingga pada tahun 2015 mencapai Rp 11.253.000 per kapita per tahun.

LAMPIRAN TABEL

Tabel : 1 Jumlah Penduduk Kota Pekalongan Tahun 2015
Menurut Kelompok Umur

Golongan Umur	L	P	L+P
(1)	(2)	(3)	(4)
0 – 4	13.021	12.061	25.082
5 – 9	13.206	12.391	25.417
10 – 14	12.974	12.674	25.648
15 – 19	13.944	13.189	27.133
20 – 24	14.842	13.154	27.996
25 – 29	12.879	12.050	24.947
30 – 34	11.458	11.682	23.140
35 – 39	11.092	11.411	22.503
40 – 44	10.109	10.661	20.770
45 – 49	9.408	10.127	19.535
50 – 54	8.589	9.047	17.636
55 – 59	6.928	6.970	13.898
60 – 64	4.288	4.416	8.704
65 +	5.719	8.405	14.124
Jumlah	148.295	148.238	296.533

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016

Tabel :2 Persentase Partisipasi Sekolah Di Kota Pekalongan Tahun 2015
Menurut Kelompok Usia Sekolah

Kelompok Usia Sekolah	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7 – 12	98,87	98,11	99,65	99,24	99,50
13 – 15	84,36	89,15	88,17	89,33	95,06
16 – 18	44,85	48,84	49,45	50,65	60,66
19 – 24	9,71	15,26	24,42	28,13	26,68

Sumber : Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Pekalongan Tahun 2015

Tabel : 3 Jumlah Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Pekalongan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	71	74	74	77	77
SD Negeri dan Swasta	125	125	101	101	98
MI Negeri dan Swasta	47	47	47	47	47
SMP Negeri dan Swasta	27	27	28	28	28
MTs Negeri dan Swasta	9	9	9	9	10
SMA Negeri dan Swasta	11	11	11	10	10
MA Negeri dan Swasta	6	6	6	6	7
SMK Negeri dan Swasta	11	13	13	13	13

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016

Tabel : 4 Jumlah Kelas Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Pekalongan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	212	233	237	254	253
SD Negeri dan Swasta	866	872	827	835	844
SMP Negeri dan Swasta	368	368	387	387	389
SMA Negeri dan Swasta	174	141	135	133	142
SMK Negeri dan Swasta	170	184	227	210	226

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016

Tabel : 5 Jumlah Murid Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Pekalongan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	2.118	2.292	4.937	2.562	2.530
SD Negeri dan Swasta	11.719	11.488	11.117	10.819	10.537
MI Negeri dan Swasta	9.554	9.697	9.819	9.975	10.220
SMP Negeri dan Swasta	11.757	11.746	12.672	12.777	12.846
MTs Negeri dan Swasta	2.984	3.440	3.231	3.747	3.601
SMA Negeri dan Swasta	3.686	3.608	5.091	5.136	5.276
MA Negeri dan Swasta	2.432	2.512	2.256	2.384	2.507
SMK Negeri dan Swasta	6.789	6.801	6.985	7.184	7.489

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016

Tabel : 6 Jumlah Guru Menurut Tingkat Pendidikan
Di Kota Pekalongan Tahun 2015

Tingkat Pendidikan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Taman Kanak-kanak	448	474	474	421	486
SD Negeri dan Swasta	1.515	1.500	1.429	1.410	1385
MI Negeri dan Swasta	536	524	545	537	534
SMP Negeri dan Swasta	764	783	744	769	747
MTs Negeri dan Swasta	205	227	224	228	250
SMA Negeri dan Swasta	329	321	318	289	290
MA Negeri dan Swasta	262	274	191	284	313
SMK Negeri dan Swasta	499	531	531	520	561

Sumber : Kota Pekalongan Dalam Angka Tahun 2016

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



Jl. Singosari, Podosugih, Pekalongan. 51111
Telp. (0285) 423504 Fax. (0285) 4420122
<http://pekalongankota.bps.go.id>
Email: bps3375@bps.go.id



Pekalongan
World's City of Batik